

WALIKOTA SOLOK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KENFILKA, SH, MH**

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA SOLOK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ZUL ELFAN UMAR, SH, M.Si**

Jabatan : WALIKOTA SOLOK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. ZUL ELFAN UMAR, SH, M.Si

Solok, November 2022
Pihak Pertama,

KENFILKA, SH, MH
NIP. 19640928 198903 1 003

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 6.823.430.335	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 549.428.100	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 124.155.100	APBD

Solok, November 2022

WALIKOTA,

 H. ZUL ELHAN UMAR, SH, M.SI

INSPEKTUR,

 KENFILKA, SH, MH
 NIP. 19640928 198903 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengawasan yang Efektif	- Persentase Obrik yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian daerah/negara	60%
		- Persentase Kerugian Daerah	0,11%
		- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	85%
		- Persentase Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Eksternal	85%
		- Persentase Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebelum 60 hari	75%
		-	Level 3
		- Persentase Perangkat Daerah yang menyatakan Puas atas Layanan Inspektorat Kota Solok	90%
		- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal BB	75%
2	Terselesainya Pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat diselesaikan	6 Kasus
3	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	- Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3	60%
		- Indeks RB	B
		- Jumlah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	4 Unit kerja
4	Terwujudnya Manajemen Internal yang efektif, efisiensi dan akuntabel	- Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Kota Solok	BB